Tindaklanjuti Instruksi Pemerintah Pusat Terkait PPKM Darurat, Pemkab Pasuruan Intens Ikuti Rakor Yang Digelar Pemprov Jatim

Jumat, 2 Juli 2021

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) PPKM Mikro Darurat secara virtual pada 1 Juli 2021 sebagai tindak lanjut instruksi pemerintah pusat terkait PPKM Darurat. Rakor ini dilakukan sebagai respons terhadap peningkatan kasus Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali. Rakor dipimpin langsung oleh Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono dan diikuti oleh seluruh Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Timur, termasuk Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya keselarasan dalam penerapan PPKM Mikro Darurat, yang mencakup sektor esensial dan non-esensial.

Pemberlakuan PPKM Mikro Darurat di Jawa Timur mengacu pada peta persebaran Covid-19, dengan sektor non-esensial menerapkan 100 persen WfH dan sektor esensial menerapkan 50 persen WfH. Gubernur juga menegaskan bahwa peraturan yang telah beredar dapat berubah sesuai instruksi terbaru dari Kementerian Dalam Negeri.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak menjelaskan bahwa PPKM Mikro Darurat mirip dengan PSBB yang diterapkan berdasarkan zona. Hal ini berdampak pada pembatasan kegiatan ibadah sebelum Idul Adha, sehingga diperlukan koordinasi dengan tokoh agama setempat terkait pelaksanaan sholat Jumat dan Sholat Idul Adha.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memantau perkembangan situasi dan menunggu instruksi terbaru dari Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan penerapan PPKM Mikro Darurat berjalan efektif dalam menekan laju penyebaran Covid-19.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.